

TURUNNYA SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEPARA

oleh

Akhsin Muktasim, Purwoko @purwoko@undip.ac.id, Fitriyah
@fitriyahundip@gmail.com, Muhammad Adnan @adonan.sensei@gmail.com
(14010110120049)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

JL. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

The general election as the Democratic Party carried out throughout Indonesia including Jepara Jepara is a small town located in the northern part of Central Java with a majority muslim population and the socio-cultural circumstances has spelled out that it was written so as to make the State of the political situation is somewhat different from other areas. Proven PPP which is the Islamic party managed to become a strong party in Jepara. Elections in the post-election reform Jepara always won by the PPP from year to year, but winning the election for PPP in coupled with the number of votes the PPP also getting down at each election. In the current study focused on researching the factors causing the decline of anything from year to year the PPP vote, whereas historically the PPP has a lot of followers and Jepara Regency has socio-cultural islam.

In this study, the author uses qualitative research methods are analytical, descriptive, using the technique of purposive sampling techniques the taking of the sample that is where researchers choose informants deemed relevant and knowledgeable which is a representation of the problem being studied. Engineering data retrieval using in-depth interviews with the informant, and secondary data with reference data written, and other data that support.

Upon the decline of the PPP vote results is the existence of a multi-party system, the system elections is fickle, and less internal conflict over the activities of the party, the shifting behavior of voters, to political money. The factor that makes the sound of PPP Jepara Regency decreased.

Advice that can be given to increase the back the sound of PPP is to ways to improve the cadre recruitment by rekrutment cadres who have the loyalty and spirit of the PPP, in addition diadakanya regular meetings need to be consolidated between the present cadres down to over PPP cadres so as to make the more powerful.

Keyword : Political Parties, Election, The Descent Of Voters Persatuan Pembangunan Party

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan indikator dari negara demokrasi, dimana masyarakat atau rakyat diminta untuk menyalurkan suaranya dengan satu orang satu suara (*one man one vote*) untuk memilih presiden, anggota legislatif, kepala daerah, maupun kepala desa, semua dilakukan dengan cara pemilihan umum. Pada masa orde baru tidak ada partai yang mendominasi selain partai Golkar, yang pada saat itu memang partai penguasa yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, dengan kemenangan meraih suara yang sangat besar. Presentase suara Golkar pun tidak tanggung-tanggung yaitu mencapai lebih dari 50% dan mendapatkan kursi paling banyak di DPR dibandingkan dengan PPP dan PDIP. Pemilu pada masa orde baru terus berlanjut dan diselenggarakan yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan hasil yang juga tidak jauh beda yaitu di menangkan oleh Golkar dengan hasil yang besar yaitu lebih dari 50%. Tetapi dengan besarnya jumlah suara yang di menangkan oleh partai Golkar bukan berarti semua rakyat atau masyarakat menyukai dan memilih partai Golkar.

Walaupun kekuatan Golkar pada saat itu sangat kuat di berbagai daerah namun di Kabupaten Jepara kekuatan basis Golkar tidak begitu kuat. Pemilihan umum di kabupaten jepara terutama pasca reformasi selalu dimenangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan.

Jepara Merupakan tempat yang masih kental dengan nilai agama dengan masyarakatnya yang menjunjung nilai-nilai agama baik dalam hubungan sosial

dan juga berpolitik. Kabupaten Jepara yang merupakan basis PPP di Jawa Tengah juga mengalami berbagai masalah dan konflik akibat adanya perpecahan di tingkat nasional. Hasil dari masalah yang terjadi di Jepara adalah terjadinya bentrokan antara masa pendukung PPP dengan pendukung masa PKB. Bentrokan ini terjadi di Desa Donggos, tepatnya terjadi pada tanggal 30 April Tahun 1999 yang bermula ketika masa PKB yang semula niat mengaji mendadak mendeklarasikan partai ranting di Desa Donggos, sontak masa PKB yang mendeklarasikan rantingnya di Desa Donggos yang merupakan desa dengan basis masa PPP marah dan menyerang masa PKB, akibat buntut dari bentrokan ini menewaskan beberapa orang dan puluhan orang lainnya luka-luka.

Pendukung PPP yang loyal dan banyak tidak lantas membuat PPP selalu mengalami kenaikan suara, dari pemilu yang telah terjadi selama empat kali pemilihan umum selalu mengalami penurunan suara. Ini menjadi hal menarik untuk diteliti mengingat Jepara merupakan basis pendukung PPP yang besar dengan keadaan geografis dan culture masyarakatnya yang terbilang cukup agamis, masih banyaknya pondok pesantren, dan masih diperlakukannya hari Jumat sebagai hari libur yang notabene merupakan harinya umat Islam. Akan tetapi dari tahun ketahun perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jepara selalu mengalami penurunan suara.

Tabel 1 : Jumlah Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pemilihan Umum Legislatif DPRD Kab. Jepara dari Tahun Ketahun

No	Partai Persatuan Pembangunan	1999	2004	2009	2014
1	Perolehan Suara	230.098	177.694	81.465	120.990
2	Presentase	40.36 %	31.69 %	15.74 %	18,94%
3	Jumlah Kursi	18 Kursi	14 Kursi	9 Kursi	9 Kursi

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

Dari data diatas menunjukkan bahwa suara Partai Persatuan Pembangunan turun dari tahun ketahun, walaupun pada tahun ada kenaikan tetapi tidak terlalu signifikan dengan hasil kursi 9 sama dengan tahun 2009. Padahal Kabupaten Jepara meruapkan basis besar PPP yang selalu menduduki peringkat atas dalam pemilu, selain itu juga masa PPP dijepara terkenal loyal dalam mendukung dilihat dari jumlah suaranya dan juga sejarahnya diwarnai dengan berbagai intrik dari masa pendukungnya dari saling sindir sampai pada aksi bentrokan. Penurunan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjadi masalah dan hal yang menarik untuk diteliti karena dilihat dari sisi dan sudut keadaan geografis dan sosial, Kabupaten Jepara masih menjunjung nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan juga berpolitik.

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan “Faktor apakah yang mempengaruhi turunnya suara Parti Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Jepara ?

B. Pembahasan

Seperti pada kehidupan yang naik dan turun seperti roda mungkin hal inilah yang sedang dialami Partai Persatuan Pembangunan yang mengalami penurunan suara dari tahun ketahun Tentunya banyak faktor yang melatarbelakangi turunnya suara PPP di kabupaten Jepara. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan turunnya suara PPP di Kabupaten Jepara, diantaranya adalah :

1. Sistem Multipartai

Berubahnya sistem partai dari ada tiga partai ke banyak partai (multipartai) agaknya berpengaruh terhadap keberadaan partai lama dan berimbas pada perolehan jumlah suara dan kursi legislatif. Pada pemilu 1999 PPP mendapatkan 40,36% suara dan memperoleh 18 kursi, selanjutnya pada tahun 2004 perolehan suara PPP adalah 31,69% dengan mendapat 14 kursi, pada tahun 2009 mendapat suara 15,74% memperoleh 9 kursi, dan pada tahun 2014 PPP meskipun suara naik, mendapat suara 18,94% namun tetap memperoleh 9 kursi. berubahnya sistem ke multipartai cukup berperan dalam mempengaruhi turunnya suara PPP, karena dulu partai politik hanya berjumlah tiga partai politik tapi sekarang ada banyak partai politik. Secara langsung maupun tidak langsung keberadaan partai-partai politik yang baru ini ikut dalam penurunan suara PPP.

Dengan adanya banyak partai membuat masyarakat menjadi punya berbagai alternatif untuk memilih, baik itu memilih ideologis, isu yang diangkat, ataupun memperhitungkan faktor *rational choice* (untung rugi) dalam memilih partai politik. Selain itu dengan munculnya partai-partai dengan dukungan dana yang besar membuat partai yang minim dana atau pas-pasan akan kalah, karena terjadi pergeseran perilaku memilih bukan karena kedekatan idealis semata tapi berdasarkan memperhitungkan untung rugi. Sehingga dengan keadaan seperti ini akan condong ke arah money politik atau politik uang, masyarakatpun akan semakin pragmatis dalam memilih partai politik.

2. Sistem pemilu yang berubah

Pemilihan umum 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik, lebih sedikit dari pada pemilihan umum 1999 yang diikuti 48 partai politik tidak membuat suara PPP menjadi naik, malah menjadi turun. Turunnya suara PPP dari tahun 1999 ke 2004 adalah 8,69 %, padahal jumlah peserta pemilu lebih sedikit. Ini karena sistem pemilu yang berubah, yaitu sistem pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu proposional setengah terbuka dimana nama caleg dimuat dalam surat suara, dimana PPP hanya mendapatkan jatah 14 kursi pada pemilu 2004.

Untuk pemilu 2009 suara PPP mendapatkan kursi di sebanyak 9 kursi dan berbanding lurus juga dengan kembali turunnya suara PPP sebanyak 15,95 % dengan peserta pemilu sebanyak 38 partai politik. Pada pemilu 2009 ini sistem pemilu berubah lagi menjadi proposional terbuka. Hal ini menyebabkan adanya persaingan bukan hanya antar partai politik tapi juga persaingan antar sesama kader PPP sendiri, karena yang menjadi sorotan bukan partai lagi tapi sosok caleg. Para caleg berlomba mendapatkan dukungan dan suara pemilih karena yang dilihat pemilih adalah sosok caleg bukan partai politiknya. Sistem pemilu proposional terbuka yang mengedepankan sosok figur caleg bukan partai politik dan partai politik hanya sebagai kendaraan politik saja menjadikan persaingan antar kader menjadi tidak sehat, akibatnya kembali lagi pada persoalan politik uang dengan harapan untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.

Pada pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik, lebih sedikit peserta pemilunya dibandingkan dengan pemilu 2009 yang diikuti oleh 38 partai politik. Pada pemilu 2014 ini suara PPP secara jumlah dan presentase mengalami

kenaikan sekitar 2,99 % yang artinya PPP mengalami kenaikan suara, tapi jumlah kursi yang diperoleh masih sama pada pemilu 2009 yaitu 9 kursi dan apabila dilihat dengan data suara PPP belumlah mengalami kenaikan suara yang terbilang baik, karena pada perolehan suara pemilu 2014 ini PPP mengalami penurunan di daerah-daerah dapilnya. Ini disebabkan juga seperti alasan perubahan sistem pemilu.

3. Konflik Internal

Di PPP sendiri ada beberapa kader yang pindah ke partai lain karena tidak dicalonkan dan gagal dalam pemilu, mereka pindah ke partai lain karena memandang partai lain lebih baik dijadikan kendaraan politik. Di sisi lain para kader yang terpilih menjadi legislatif cenderung lupa dan tidak memperhatikan warga PPP. Kader yang duduk di DPRD sekarang kurang memperhatikan warga PPP karena untuk biaya operasional kegiatan rutin seperti pengajian atau idaroh kurang ada bantuan

Selain hal di atas masalah internal PPP Jepara adalah kurangnya pengkaderan kader baru. Hal ini disebabkan karena kurang aktifnya kepengurusan kepartaian PPP dalam menjalankan kegiatan politiknya tidak seperti dulu yang selalu aktif dan rutin dalam menjalankan kegiatan partai maupun kegiatan keagamaan. Kurang aktifnya PPP dalam kurang aktif kegiatan partai dan perekrutan kader membuat partai ini masih didominasi orang tua dan tradisional yang membuat suara PPP semakin sempit dan menurun.

4. Pergeseran perilaku pemilih

Sistem multipartai yang memunculkan partai-partai baru dengan berbagai ideologis membuat pemilu menjadi semakin ketat. Masyarakat tidak hanya terbatas hanya memilih tiga partai saja (Golkar, PPP, PDIP) tetapi punya banyak pilihan partai. PPP yang dulunya selalu memenangkan pemilu dengan suara jauh dari pesaing-pesaingnya sekarang menang hanya berselisih tipis-tipis dari partai lain. Hal ini disebabkan banyaknya partai politik muncul dengan memiliki idologi yang hampir-hampir sama, akibatnya visi dan misi yang diperjuangkan hampir-hampir sama. Seperti untuk partai berasas islam yang dulunya hanya ada PPP tapi sekarang ada partai PKB, PAN, PKNU, dan masih banyak lainnya. Dengan banyaknya partai politik masyarakat leluasa untuk memilih partai politik yang seragam entah itu yang berasaskan islam ataupun nasionalis. Disini termasuk indikasi pergeseran perilaku pemilih masyarakat Jepara. Sistem multi partai ini menawarkan alternatif kepada masyarakat untuk memilih partai politik.

Selain sistem multipartai, yang menjadi perubahan perilaku adalah sistem pemilu yang berubah menjadi sistem proposional terbuka, yaitu memilih para calon legislatif secara langsung. Sistem pemilu untuk memilih langsung para caleg ini membuat terbukanya politik uang. Sistem politik yang mensyaratkan caleg yang bisa mendapatkan suara terbanyak bisa langsung duduk langsung menjadi anggota legislatif, dengan begitu maka caleg berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan suara diantaranya dengan politik uang. Sudah menjadi rahasia umum jika politik uang menjadi hal lumrah dikalangan masyarakat saat menjelang pemilu selain itu banyak caleg partai yang melakukan politik uang

seperti simbiosis mutualisme yang akan berakibat buruk pada ekosistem politik dan pemerintahan. Dengan adanya praktek politik uang ini sangat merubah karakter pemilih warga jepara yang dulu memilih karena keikhlasan tetapi sekarang memilih dengan balasan uang yang diberikan oleh caleg.

5. Politik Uang (*Money Politik*)

Money politik atau yang sering disebut politik uang merupakan bentuk kegagalan partai dalam menjalankan fungsinya dalam sosialisasi politik, komunikasi politik dan rekrutment politik. Proses terjadinya politik uang ini karena masyarakat sudah tidak percaya dengan partai politik sehingga masyarakat mengharapkan timbal balik dengan partai ataupun calon legislatif ataupun faktor untung rugi (*rational choice*). Di Indonesia politik uang sudah menjadi rahasia umum dan bahkan masyarakat pun menunggu ada yang membeli suaranya. Politik uang ini sangat masive terjadi saat pemilu sayangnya hanya sedikit yang bisa diproses pelanggarannya oleh pengawas selaku lembaga yang berwenang.

Penurunan suara PPP bisa dikarenakan serangan politik uang yang *masive* dari oknum lawan PPP, karena dengan adanya banyak partai yang mempunyai dana yang besar dan target mendapatkan suara yang banyak maka cara apapun dilakukan guna mengejar dan mendapatkan suara. Dari sinilah indikasi yang mudah dilihat bahwa turunnya suara PPP karena adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh oknum caleg dengan tujuan mendapatkan suara yang banyak dengan cara instant yaitu politik uang, dan sayangnya masyarakat sebagian besar membetulkan politik uang tersebut dan bahkan memanti adanya politik uang saat pemilu.

C. Penutup

Kesimpulan

Turunnya suara PPP dari pemilu 1999 sampai 2014 terjadi karena berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya perpecahan diantara kader mulai dari kaderisasi, tidak dicalonkan menjadi caleg, sampai perebutan suara untuk mendapatkan kursi legislatif. Untuk faktor eksternal adalah perubahan sistem partai ke multipartai, perubahan pemilu proposional berdasarkan suara terbanyak, dan perubahan perilaku pemilih yang semula berdasarkan kedekatan ideologis ataupun sosiologis, namun bergeser menjadi pemilih pragmatis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan geografis Jepara yang mayoritas muslim dan dengan budaya agama yang relatif masih kuat tidak mendorong suara PPP menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan adanya sistem multipartai yang membuat partai baru muncul menjadikan suara PPP Jepara semakin turun. Banyaknya partai serupa yang berbasis islam seperti PKB, PKS, PKNU, PBB, PAN membuat suara PPP semakin turun. Selain muncul partai yang berazaskan islam, partai yang berideologi nasionalis seperti PDIP, NASDEM, GERINDRA juga turut menurunkan suara PPP. Dengan tampilan dan jargon yang lebih menarik serta sosok tokoh yang kharismatik membuat partai PPP semakin turun. Seperti dipaparkan diatas bahwa PPP hanya mengusung jargon islam dengan pengikut tradisional dan minimnya kaderisasi maka suara PPP Jepara semakin sempit dan menurun.

Selain dari sistem multipartai penurunan suara PPP juga dipengaruhi perubahan sistem pemilu yang sering berubah. Sistem pemilu pada 1999 yaitu penetapan calon legislatif didasarkan pada ranking perolehan suara partai daerah pemilihnya, artinya jika caleg A meski berada di urutan terbawah caleg, jika di daerah pemilihannya partainya mendapat kursi maka caleg A akan terpilih menjadi anggota legislatif. Tetapi sejak pemilu 2004 sistem pemilu berubah menjadi proposional terbuka yang dalam surat suara ada nama caleg sehingga partai berlomba-lomba memasang kader terbaik untuk dipasangkan menjadi caleg sesuai nomor urut. Pada pemilu ini ada beberapa kader yang memiliki banyak pengikut keluar dari PPP sehingga membuat suara PPP menjadi turun. Pada tahun 2009 sistem pemilu berubah lagi yaitu masih sama memilih caleg secara langsung tapi tidak ada nomor urut melainkan dengan suara terbanyak, dari sinilah para caleg harus bekerja keras untuk mendapat dukungan dan suara rakyat maka cara apapun ditempuh sehingga muncullah politik uang (money politik) dan terjadi persaingan yang tidak sehat sesama kader maupun partai lainnya, sehingga berimbas pada turunnya suara PPP sebanyak 15,95%. Pada pemilu 2014 sistem pemilu berubah lagi yaitu dengan suara terbanyak tapi menggunakan nomor urut tanpa menggunakan foto, pada pemilu ini suara PPP nampaknya belajar cukup banyak dari pengalaman pemilu lalu terbukti pada pemilu 2014 ini suara PPP naik 2,99% walaupun perolehan kursinya tetap sama pada tahun 2009 yaitu 9 kursi sama yang didapatkan PDIP walaupun PPP masih menang dalam jumlah suara.

Pergeseran perilaku pemilih terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Jepara. Pemilih yang dulu memilih berdasarkan kriteria tertentu entah itu

berdasarkan kedekatan ideologis, sosiologis maupun kesamaan visi dan misi tetapi sekarang memilih berdasarkan pertimbangan pragmatis. Pergeseran perilaku ini membuat berubahnya karakter memilih Jepara dan mengakibatkan masyarakat cenderung menjadi materialistis saat pemilu. Pragmatisme ini mengarah ke politik uang (money politik) dimana masyarakat diberikan uang untuk membeli suaranya. Masyarakat pun mengiyakan adanya praktek politik uang sebagai bentuk timbal balik. Dari sisi ekosistem pemilih jepara bergeser yang semula memilih berdasarkan keikhlasan tetapi sekarang memilih berdasarkan pertimbangan pragmatis sehingga mengakibatkan suara PPP menjadi turun.

Dari beberapa temuan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa keadaan geografis jepara yang mayoritas muslim dengan budaya agama yang cukup kurang relevan dalam memahami persoalan penurunan suara PPP Jepara. Keadaan masyarakat yang mayoritas muslim itu hanya kulitnya bukan isinya, untuk penyumbang suara terbanyak PPP adalah dari masa yang masih loyal terhadap PPP masa tradisional, golongan santri dan golongan orang tua, mereka umumnya adalah pemilih PPP sejak dulu dari generasi ke generasi yang sudah mengakar. Minimnya kaderisasi membuat PPP kurang mendapatkan hati masyarakat muda walaupun ada anak muda yang memilih PPP tetapi biasanya karena pengaruh dari keluarganya karena bapak ibunya memilih PPP. Masa tradisional dan golongan orang tua ini adalah garis depan pendukung PPP di Jepara.

Meskipun Jepara memiliki budaya agama cukup kuat dan mayoritas muslim sudah tidak relevan dan komprehensif lagi dalam memahami peta politik Jepara, namun tidak bisa dilihat sebelah mata begitu saja. Walaupun PPP

mengalami penurunan suara, namun pemilih dari orang tua, golongan santri, dan masa traditionla merupakan pemilih yang sangat loyal terhadap PPP. Walaupun untuk sekarang partai beraliran muslim sudah mulai tergerus dan kalah populer dengan partai nasionalis tetapi untuk daerah Jepara sudah memiliki masa yang loyalitas sudah mengakar sejak zaman orde baru, masa loyal ini kemudian mewariskan kelayalitan terhadap PPP kegenerasi berikutnya dari orang tua ke anak-anaknya sampai sekarang.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan guna meningkatkan perolehan suara PPP kembali adalah dengan adanya kaderisasi yang berkelanjutan artinya kaderisasi yang berhenti dan stag pada orangtua ataupun masa yang traditional bisa sampai pada orang-orang baru yang mempunyai visi dan misi yang sama yang diemban oleh PPP, agar kader yang dicetak mempunyai loyalitas, intergritas yang baik serta semangat PPP. Selain itu perlu diadakan pembahasan konsolidasi antar ranting, anak cabang (PAC), hingga cabang (DPC) sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik dan membuat partai PPP semakin solid.

Daftar Rujukan

Organisasi/Badan/Lembaga :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

Perundang-Undangan :

UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan karya

Undang Undang Tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011